

Persepsi Publik terhadap Pergantian Menteri Pendidikan: Studi Survei di Kalangan Mahasiswa dan Tenaga Pendidik

Fadhilah Sabrina¹, Tri Saputra², Faqih Fuadi Lahfi³, Abdul Fadhil⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta

e-mail: fadilahsabrina552@gmail.com

Abstract : *The change of Minister of Education is often followed by new policies that cause various reactions among the public, including students and educators. This study aims to understand public perceptions of the change of Minister of Education and its implications for curriculum policy. This research uses a descriptive qualitative approach with a questionnaire-based interview data collection method to educators and students. The results showed that most respondents had positive expectations of the new minister, especially regarding improving the quality of education and reducing the administrative burden on teachers. However, there were concerns about repeated curriculum changes. Respondents emphasized the importance of inclusive communication, strengthening the role of teachers and improving education infrastructure. Active stakeholder support is considered essential in realizing relevant, effective and sustainable education policies.*

Keywords: *public perception, minister replacement, education policy, curriculum, educator*

Abstrak : Pergantian Menteri Pendidikan sering kali diikuti oleh kebijakan baru yang menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa dan tenaga pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi publik terhadap pergantian Menteri Pendidikan dan implikasinya terhadap kebijakan kurikulum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara berbasis angket kepada tenaga pendidik serta mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki harapan positif terhadap menteri baru, khususnya terkait peningkatan kualitas pendidikan dan pengurangan beban administrasi guru. Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran terhadap perubahan kurikulum yang berulang. Responden menekankan pentingnya komunikasi yang inklusif, penguatan peran guru, dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Dukungan aktif stakeholder dinilai esensial dalam mewujudkan kebijakan pendidikan yang relevan, efektif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: persepsi publik, pergantian menteri, kebijakan pendidikan, kurikulum, tenaga pendidik

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman senantiasa menghadirkan tantangan baru yang sering kali tidak terbayangkan sebelumnya. Sejak merdeka hingga saat ini, bangsa Indonesia telah mengalami empat model kepemimpinan yaitu Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan yang sekarang, yang banyak disebut para pengamat sebagai era transisi menuju demokrasi. Pada masa ini, pendidikan nasional sering kali menjadi subordinasi dari kekuatan politik praktis. Ini berarti bahwa pendidikan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terlibat dalam dinamika perebutan kekuasaan yang melibatkan berbagai partai politik (Nasution, 2008). Bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan nasional. Perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan sering kali membawa transformasi kebijakan yang memengaruhi berbagai sektor, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No. 20 Tahun 2003, adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar dan terencana untuk menciptakan suasana serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi diri mereka secara

aktif. Dengan hadirnya kepemimpinan yang baru, diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan dan mendukung kemajuan di bidang pendidikan. Tujuan dari pendidikan ini adalah agar siswa dapat memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan sosial, kekuatan spiritual, kepribadian yang baik, serta akhlak yang mulia sehingga mereka dapat berkembang menjadi individu yang berkualitas (Amelia, 2019).

Pada setiap pergantian menteri, sering kali disertai dengan perubahan kurikulum, yang biasanya didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman menteri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan ideologi dari masing-masing pemimpin. Ketika pemimpin baru menjabat, mereka sering membawa visi dan misi yang berbeda, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang sedang berkembang (Amelia, 2019). Meskipun pergantian kurikulum terkadang diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, hal ini sering menimbulkan ketidakpastian di kalangan pendidik dan siswa. Perubahan ini tentunya menjadi harapan besar bagi masyarakat, agar pemimpin baru ini mampu melakukan transformasi pendidikan yang signifikan. Transformasi pendidikan tidak hanya sekadar perubahan kurikulum, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas guru, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan peran teknologi dalam pembelajaran.

Dalam proses penyusunannya, kurikulum dapat dipahami sebagai rencana yang terstruktur, dimulai dari analisis kebutuhan (*needs assessment*), kemudian diikuti oleh penentuan tujuan pendidikan yang jelas. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa kurikulum perlu diperbarui, di antaranya adalah perubahan waktu dan kebutuhan masyarakat. Melihat siklus evaluasi dari kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini, akan lebih bijaksana jika kita melakukan satu siklus evaluasi tambahan sebelum memutuskan untuk mengganti kurikulum yang ada. Rancangan kurikulum yang diajukan oleh Nadiem Makarim, misalnya, telah menimbulkan berbagai kontroversi, yang merupakan hal wajar, terutama bagi mereka yang mungkin tidak sepenuhnya memahami kebutuhan dan kondisi pendidikan saat ini (Haiyudi, 2024). Secara umum, kurikulum perlu diperbarui setelah melewati periode tertentu, biasanya sekitar sepuluh tahun penerapan, yang dianggap ideal untuk mengukur hasil dalam pengembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, penentuan kebijakan selanjutnya sebaiknya didasarkan pada hasil evaluasi yang komprehensif, bukan hanya pada perubahan kepemimpinan.

Baru-baru ini, Presiden RI, Bapak Prabowo, telah mengumumkan susunan kabinetnya dengan sebutan "Kualisi Indonesia Maju" (KIM). Dalam kabinet ini, kementerian pendidikan dasar dan menengah dipimpin oleh Bapak Abdul Mu'ti, yang merupakan sosok baru di bidang

ini. Beberapa pekan setelah pelantikan, Pak Menteri mulai mewacanakan perubahan terhadap kurikulum Merdeka dengan pengenalan kurikulum baru yang dinamakan "*Deep Learning*." Kurikulum ini mencakup dimensi "bermakna" (*meaningful*), "menyenangkan" (*joyful*), dan "kepekaan" (*mindful*), sehingga nama lain kurikulum ini adalah "ful-ful." Menurut Pak Menteri, perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi penerapan kurikulum Merdeka yang dinilai sangat kompleks dan membebani para guru. Mungkin saja, langkah ini merupakan upaya Pak Menteri untuk mempercepat kemajuan pendidikan di tingkat dasar dan menengah agar selaras dengan visi dan arah kabinet KIM (Gunas, 2024).

Dalam konteks ini, pengembangan kurikulum yang ada saat ini tampaknya lebih bijaksana dibandingkan dengan merancang kurikulum baru dari awal. Narasi tentang kemungkinan pergantian kurikulum seiring dengan pergantian menteri pendidikan mungkin telah menimbulkan kecemasan di kalangan guru dan tenaga pendidik. Kekhawatiran tersebut, meskipun wajar, sebaiknya tidak berlebihan. Sebagus apa pun kurikulum yang dirancang oleh pemerintah, jika agen yang menyampaikannya, yaitu para guru, menghadapi berbagai kendala, maka implementasi kurikulum tersebut bisa menjadi tidak efektif. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan menjadi suatu keharusan untuk menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, alih-alih mengganti kurikulum yang sudah ada, lebih baik kita memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Dengan fokus pada pengembangan kompetensi guru dan integrasi teknologi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan relevan bagi generasi mendatang.

Sejalan dengan hal ini, rumusan masalah penelitian ini menjadi semakin penting: "Bagaimana persepsi publik, khususnya di kalangan mahasiswa dan tenaga pendidik, terhadap pergantian menteri pendidikan terkait isu perubahan kurikulum serta bagaimana hal ini dipengaruhi oleh perubahan kepemimpinan, peran stakeholder, dan komunikasi yang dilakukan oleh menteri baru?" Dengan memahami persepsi publik, kita dapat mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang muncul, yang dapat memengaruhi implementasi kurikulum dan kebijakan pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, hal ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana komunikasi yang efektif dari menteri pendidikan dapat mengurangi kecemasan di kalangan guru dan tenaga pendidik, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik antara semua pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara berbasis angket. Metode ini dipilih untuk menggali persepsi, pandangan, serta harapan dari responden terkait pergantian menteri pendidikan dan pengaruhnya terhadap kebijakan pendidikan, khususnya pada perubahan kurikulum.

Subjek penelitian terdiri atas dua kelompok utama, yaitu tenaga pendidik dan mahasiswa. Tenaga pendidik yang menjadi responden adalah para guru yang mengajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah, sedangkan kelompok mahasiswa yang dilibatkan adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan di program studi yang relevan dengan bidang pendidikan. Pemilihan responden dilakukan secara *purposive sampling* yaitu sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti untuk memastikan pandangan berdasarkan pengalaman dan latar belakang pendidikan mereka.

Pengumpulan data yang digunakan melibatkan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara angket yang dirancang dengan pertanyaan terbuka. Penyebaran angket wawancara dilakukan secara daring menggunakan platform *google form*. Pendekatan ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak responden secara efisien sekaligus memberikan fleksibilitas bagi responden dalam mengisi angket. Sumber data primer pada penelitian ini adalah tenaga pendidik; A1, A2, E1, E2, N, K dan mahasiswa; B, M, Q, T. Wawancara yang diajukan seputar pergantian menteri pendidikan isu perubahan kurikulum. Sedangkan Sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan bantuan media internet. Sumber data sekunder berlaku sebagai data pendukung atau penguat daripada data primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil daripada wawancara berbasis angket yaitu :

1. Sebagian besar responden memberikan pandangan yang beragam terhadap menteri pendidikan yang baru setelah mendengar atau membaca tentangnya. Responden A2, E1, B, dan T menyatakan dukungan mereka terhadap menteri pendidikan yang baru dengan harapan agar program pendidikan di masa mendatang dapat menjadi lebih baik dan membawa perubahan yang positif. Mereka juga menyampaikan doa agar kebijakan yang diusung mampu memberikan dampak terbaik bagi dunia pendidikan. Di sisi lain, responden A1 dan N menyoroti bahwa pergantian menteri pendidikan sering kali diikuti oleh perubahan kurikulum, yang menurut mereka dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik dan peserta didik. Sementara itu, responden lainnya,

seperti K, M, dan Q, mengungkapkan bahwa mereka belum cukup mengetahui atau mendalami sosok menteri pendidikan yang baru sehingga belum memiliki pandangan yang mendalam terkait arah kebijakan yang mungkin diambil.

2. Tanggapan terhadap isu perubahan kurikulum yang dinamakan kurikulum "full-full" yang mencakup aspek *mindful*, *meaningful*, dan *joyful* beragam di antara responden. Responden E mengungkapkan bahwa mereka belum mendalami konsep tersebut, namun berharap agar perubahan kurikulum tidak membebani guru dengan terlalu banyak administrasi. Sementara itu, responden Q berpendapat agar yang perlu dibenahi adalah hal-hal yang masih kurang baik dalam sistem pendidikan, tanpa merinci lebih lanjut. Responden N cenderung netral, menyatakan bahwa perubahan kurikulum tersebut terasa biasa saja baginya. Responden B menyatakan bahwa apapun nama kurikulum yang diterapkan, jika pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, maka hal tersebut sah-sah saja. Di sisi lain, responden A1 mendukung jika kurikulum tersebut diterapkan di tingkat SMA, dengan penekanan bahwa pembelajaran harus memiliki makna bagi siswa. Responden A2 menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami kurikulum "full-full" ini. Sementara responden T merasa bahwa kurikulum tersebut tidak berbeda jauh dengan Kurikulum Merdeka yang sebelumnya diterapkan.
3. Semua responden sepakat bahwa peran pelajar dan tenaga pendidik sangat penting dalam setiap keputusan yang diambil oleh menteri pendidikan. Mereka menilai bahwa kebijakan pendidikan harus melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran untuk memastikan keputusan yang diambil relevan dan efektif. Dengan melibatkan pelajar dan tenaga pendidik, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan serta menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan bermakna. Responden memberikan berbagai masukan konstruktif mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh menteri pendidikan untuk berkomunikasi lebih baik dengan pelajar dan tenaga pendidik. Responden N menyarankan agar menteri berdialog secara langsung dengan para pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, sementara E1 menekankan pentingnya mendengarkan keluhan pelajar dan tenaga pendidik serta memberikan solusi yang terbaik. Responden K mengusulkan agar menteri melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah sebagai bentuk pengawasan sekaligus menyediakan platform untuk menyampaikan aspirasi yang dapat didengar, dihargai, dan ditindaklanjuti. Dalam pandangan E2, monitoring dan diskusi dengan guru, khususnya di sekolah swasta, juga menjadi langkah penting. Sementara itu, responden Q menyarankan agar menteri memfasilitasi pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan

kompetensi tenaga pendidik. N juga menambahkan bahwa seminar dapat menjadi sarana efektif untuk berkomunikasi dan berbagi wawasan. Responden B menekankan pentingnya menteri turun langsung ke lapangan tanpa adanya unsur *gimmick* yang tidak relevan. Responden A1 mengungkapkan bahwa studi masalah mendalam diperlukan untuk memahami kondisi pendidikan secara utuh. Selain itu, A2 dan T sepakat bahwa forum diskusi, baik bersama guru maupun pelajar, adalah cara yang efektif untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan inklusif. Diskusi publik yang sering diadakan, menurut mereka, dapat menjadi media untuk menyerap masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan.

4. Responden memiliki harapan yang beragam terhadap kebijakan yang akan diambil oleh Menteri Pendidikan yang baru, terutama mengingat masa jabatannya yang relatif singkat. Responden N dan E menyoroti perlunya pengurangan beban administrasi guru. Mereka berharap agar kebijakan yang diambil dapat memudahkan guru dalam mendidik anak-anak bangsa tanpa harus terlalu sibuk dengan tugas administratif yang berlebihan. Harapan serupa juga diungkapkan oleh responden K dan E2, yang menekankan pentingnya kebijakan yang bersinergi dengan semua tenaga pendidik, termasuk guru di lembaga swasta. Mereka menggarisbawahi bahwa kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik, baik yang berstatus ASN, P3K, maupun guru honorer dan swasta, perlu menjadi prioritas. Selain itu, responden A2 dan T secara spesifik berharap agar kebijakan yang diambil dapat meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberikan perhatian pada gaji yang layak. Responden Q menyarankan agar profesionalisme dalam pengelolaan kebijakan pendidikan lebih ditingkatkan, sedangkan responden N menambahkan pentingnya membuat kebijakan yang bijak dan memberikan akses biaya pendidikan yang lebih terjangkau. Di sisi lain, responden B berharap agar gagasan baru dari Menteri Pendidikan mampu membawa perubahan sistem pendidikan yang lebih efektif. Responden A1 juga menekankan perlunya penyesuaian kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi anak-anak saat ini. Secara keseluruhan, para responden mengharapkan kebijakan yang tidak hanya bersifat inovatif, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, dan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat luas.

Dari responden tersebut bahwasanya persepsi publik, terutama dari kalangan mahasiswa dan tenaga pendidik terhadap pergantian Menteri Pendidikan yang baru menunjukkan pandangan yang beragam mengenai harapan dan tantangan yang dihadapi.

- **Dukungan dan Harapan**

Responden menunjukkan dukungan terhadap menteri yang baru dengan harapan adanya perubahan positif dalam kebijakan pendidikan. Harapan ini terutama terfokus pada manajemen peningkatan mutu pendidikan, yang diharapkan dapat membawa dampak signifikan bagi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020). Pendidikan yang berkualitas adalah harapan dan tuntutan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Setiap orang tentu lebih memilih untuk belajar di lembaga yang memiliki mutu yang baik.. Untuk mengukur kualitas pendidikan, maka diperlukan kriteria atau indikator yang jelas. Beberapa indikator tersebut meliputi (Fadhli, 2017):

1. Nilai-nilai moral dan karakter yaitu pendidikan yang baik harus mampu membentuk karakter dan moral yang tinggi pada siswa.
2. Hasil ujian siswa yang memuaskan yaitu siswa seharusnya menunjukkan prestasi yang baik dalam ujian sebagai bukti pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan.
3. Dukungan dari orang tua dan masyarakat yaitu keterlibatan orang tua, dunia usaha, dan masyarakat setempat sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung.
4. Sumber daya yang mencukupi yaitu lembaga pendidikan harus memiliki sumber daya yang cukup, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajar.
5. Penggunaan teknologi terkini berupa implementasi teknologi terbaru dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan belajar.
6. Kepemimpinan yang kuat yaitu pemimpin lembaga pendidikan harus memiliki visi yang jelas dan mampu mengarahkan lembaga menuju tujuan yang diinginkan.
7. Perhatian terhadap siswa berupa kepedulian terhadap kebutuhan dan perkembangan siswa sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang positif.
8. Kurikulum yang seimbang dan relevan yaitu kurikulum yang diajarkan harus seimbang dan relevan dengan kebutuhan siswa dan tuntutan zaman.

Harapan dari kebijakan ini adalah untuk memperbaiki standar penilaian pendidikan, karena hal ini menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), diharapkan mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Kebijakan pendidikan yang diterapkan harus sistematis dan terencana, serta didukung oleh regulasi yang jelas agar semua

satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Menurut Hadis dan Nurhayati (2010) dalam (Fadhli, 2017), ada banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan dari perspektif yang lebih luas. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah kurikulum yang efektif, kebijakan pendidikan yang mendukung, fasilitas yang memadai, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, penting juga untuk menerapkan metode, strategi, dan pendekatan pendidikan yang modern serta evaluasi yang tepat. Biaya pendidikan yang terjangkau, manajemen yang profesional, dan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman juga sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.

- **Pentingnya Keterlibatan Stakeholder**

Stakeholder adalah semua pihak dalam masyarakat, baik individu, komunitas, atau kelompok, yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan organisasi, perusahaan, atau isu yang sedang dibahas. Dalam bahasa Indonesia, stakeholder sering disebut sebagai pemangku kepentingan atau pihak yang memiliki kepentingan. Untuk memahami lebih dalam tentang stakeholder, kita bisa merujuk pada beberapa pendapat para ahli (Rosyda, 2021):

- a. Menurut Freeman, stakeholder adalah kelompok masyarakat atau individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi dalam mencapai tujuan tertentu dari sebuah organisasi.
- b. Wibisono menjelaskan bahwa stakeholder adalah orang atau kelompok yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas dan keberadaan perusahaan.
- c. Menurut ISO 26000, stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi.

Definisi stakeholder dalam Kamus Manajemen Mutu menjelaskan bahwa stakeholder adalah kelompok atau individu yang berada di dalam atau di luar organisasi dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian misi, tujuan, dan strategi organisasi. Stakeholder tidak hanya terbatas pada pemegang saham dan karyawan, tetapi juga mencakup berbagai pihak lain yang memiliki kepentingan, seperti pelanggan, pemasok, komunitas, dan pemerintah (Sundari & Pharama, 2021). Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang-orang atau kelompok yang berperan sebagai pendukung dan pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti orang tua siswa, guru, kepala sekolah, pemerintah, masyarakat, dan bahkan siswa itu sendiri.

Mereka yang termasuk dalam stakeholder pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung dan mengembangkan lembaga pendidikan. Misalnya, orang tua berkontribusi dengan memberikan dukungan moril dan finansial, sementara guru bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar dan pengembangan kurikulum. Kepala sekolah mengelola lembaga dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan lancar. Pemerintah juga berperan sebagai stakeholder yang memberikan regulasi, anggaran, dan kebijakan yang mempengaruhi sistem pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, masyarakat sekitar dapat memberikan dukungan melalui program-program kemitraan atau kegiatan sukarela yang bermanfaat bagi sekolah.

Stakeholder pendidikan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama (Sundari & Pharama, 2021):

1. Sekolah yang termasuk para guru, kepala sekolah, murid, dan staf administrasi. Di dalam sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk meningkatkan prestasi siswa, menciptakan suasana kerja yang baik bagi guru, dan membentuk karakter keseluruhan sekolah. Kepala sekolah juga berfungsi sebagai penghubung antara guru, orang tua, dan stakeholder lainnya (Muhadi 2021). Siswa, terutama di era globalisasi, menjadi semakin beragam karena adanya teknologi yang memberi mereka akses ke tempat belajar informal seperti internet dan media sosial. Guru, sebagai elemen kunci dalam pendidikan, dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan bertanggung jawab atas pengalaman belajar siswa.
2. Pemerintahan diwakili oleh para pengawas, pemilik lembaga pendidikan, dinas pendidikan, walikota, hingga menteri pendidikan nasional. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah harus bekerja sama dengan stakeholder lain. Mereka berperan sebagai mediator antara berbagai aktor pendidikan, baik di tingkat daerah maupun pusat (Muhadi 2021). Kebijakan yang diambil oleh pemerintah diharapkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh stakeholder pendidikan lainnya serta mendukung kerja sama di antara mereka. Stakeholder pendidikan juga memiliki hubungan penting dengan menteri pendidikan yang baru. Menteri pendidikan berperan sebagai pemimpin yang mengatur dan mengawasi implementasi kebijakan pendidikan di seluruh negara. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan:
 - a. Pengambilan Kebijakan: Menteri pendidikan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Mereka harus mendengarkan masukan dari berbagai stakeholder, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat, agar kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

- b. **Sinergi dengan Stakeholder:** Menteri pendidikan perlu menjalin komunikasi yang baik dan membangun sinergi dengan stakeholder lain, seperti dinas pendidikan daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat dijalankan dengan efektif di berbagai tingkatan.
 - c. **Respons terhadap Tantangan:** Dengan adanya perubahan cepat, termasuk kemajuan teknologi dan kebutuhan dunia kerja, menteri pendidikan harus mampu merespons tantangan ini dengan kebijakan yang inovatif. Ini termasuk memfasilitasi pelatihan untuk guru agar mereka dapat mengadopsi metode pengajaran yang lebih modern dan relevan.
 - d. **Akuntabilitas:** Menteri pendidikan juga bertanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas dalam sistem pendidikan. Ini berarti mereka harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat memberikan hasil yang terukur dan bermanfaat bagi semua stakeholder.
 - e. **Partisipasi Masyarakat:** Menteri pendidikan harus mengajak masyarakat, termasuk orang tua dan komunitas, untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan. Ini bisa dilakukan melalui forum diskusi, konsultasi publik, atau program-program yang melibatkan masyarakat dalam mendukung pendidikan yang berkualitas.
3. Masyarakat yang berkepentingan dalam pendidikan mencakup orang tua siswa, pengamat dan ahli pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan yang membutuhkan tenaga terdidik, penerbit buku, penyedia alat pendidikan, dan lainnya. Masyarakat berperan sebagai stakeholder eksternal yang berhubungan dengan pendidikan, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam sistem pendidikan. Meskipun mereka penting, masyarakat tidak memiliki kemampuan yang sama dengan sekolah dan pemerintah untuk mengubah sistem pendidikan secara langsung.

- **Kementrian Pendidikan dan Hubungan dengan Kurikulum Merdeka**

Pembagian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menjadi tiga kementerian oleh Presiden Prabowo Subianto adalah langkah penting dalam memperbaiki sistem birokrasi. Tiga kementerian baru tersebut adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yaitu Prof. Dr. Ir. Satriyo Soemantri Brodjonegoro, serta Kementerian Kebudayaan yaitu Dr. Fadli Zon MSc. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan dan riset (Abidin, 2024). Dengan adanya kementerian yang lebih fokus, diharapkan setiap sektor dapat bekerja lebih baik dalam mencapai tujuannya. Misalnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat lebih berkonsentrasi pada pengembangan kurikulum dan kualitas pengajaran di sekolah-

sekolah, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi dapat fokus pada peningkatan kualitas universitas dan riset.

Pembagian Kemendikbud-Ristek menjadi tiga kementerian memberikan kesempatan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk lebih fokus dalam pengembangan Kurikulum Merdeka. Dengan adanya ruang dan perhatian yang lebih besar, kementerian ini dapat mengeksplorasi potensi Kurikulum Merdeka secara mendalam dan menyesuaikannya dengan kebutuhan siswa serta kondisi daerah yang bervariasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pemisahan ini dapat memberikan keuntungan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka (Abidin, 2024):

1. Fokus lebih besar kepada pengembangan kurikulum yang responsive

Dengan kementerian yang khusus menangani pendidikan dasar dan menengah, ada peluang lebih besar untuk mengembangkan kurikulum yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan siswa. Kementerian dapat lebih mudah melakukan penelitian dan mengumpulkan data tentang apa yang dibutuhkan siswa di berbagai daerah, sehingga kurikulum bisa disesuaikan dengan konteks lokal.

2. Peningkatan keterlibatan daerah dalam implementasi kurikulum

Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya fleksibilitas dan penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Artinya, setiap daerah memiliki kesempatan untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kondisi dan budaya setempat. Dengan adanya kementerian yang lebih fokus, kolaborasi antara kementerian dan pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta sekolah-sekolah di daerah dapat ditingkatkan.

3. Pemberdayaan guru dalam implementasi kurikulum merdeka

Dengan adanya kementerian yang lebih fokus, perhatian yang lebih besar dapat diberikan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan guru. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang khusus, di mana guru dilatih tentang metode pengajaran inovatif, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan cara menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Selain itu, guru juga memerlukan akses ke sumber daya yang memadai, seperti buku pelajaran dan alat bantu belajar, agar mereka memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengajar dengan baik. Membangun komunitas pembelajaran di antara para guru juga sangat penting. Dengan menciptakan forum atau kelompok diskusi, guru dapat saling berbagi pengalaman, strategi, dan tantangan yang mereka hadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu, program mentoring di mana guru yang lebih berpengalaman membantu guru baru atau yang kurang berpengalaman bisa sangat bermanfaat. Tak kalah penting, penghargaan dan pengakuan

terhadap usaha guru dalam menerapkan kurikulum juga dapat memotivasi mereka untuk terus berinovasi.

4. Peningkatan infrastruktur dan sumber daya

Kebutuhan infrastruktur pendidikan yang bervariasi di setiap daerah sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan kurikulum. Dengan adanya kementerian yang lebih fokus pada pendidikan dasar dan menengah, pemerintah dapat lebih serius dalam memperhatikan pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini sangat penting untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Infrastruktur yang baik, seperti gedung sekolah yang layak, ruang kelas yang nyaman, dan akses ke teknologi informasi, sangat memengaruhi proses belajar mengajar. Dengan memperbaiki fasilitas pendidikan, siswa akan merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk belajar. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap sekolah memiliki sumber daya yang cukup, seperti buku pelajaran, alat bantu belajar, dan perangkat teknologi yang mendukung pembelajaran modern.

5. Koordinasi lebih kuat dengan kementerian kebudayaan dan Pendidikan tinggi

Kementerian Kebudayaan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum, sehingga pendidikan menjadi lebih relevan bagi siswa di berbagai daerah. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Tinggi dapat membantu dalam menyelaraskan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan kebutuhan pendidikan tinggi, memastikan bahwa siswa siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dengan koordinasi yang lebih baik antara kementerian-kementerian ini, strategi dan kebijakan pendidikan dapat disusun secara terpadu, yang akan membawa dampak positif bagi kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Komunikasi yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi kunci penting dalam mendukung pengembangan Kurikulum Merdeka atau implementasi kurikulum yang direncanakan, seperti Kurikulum Full-Full (*mindful, meaningful, joyful*). Pendekatan dialogis melalui diskusi publik, kunjungan langsung ke sekolah, dan penggunaan platform digital dapat menjadi cara efektif untuk menjembatani aspirasi pelajar, tenaga pendidik, dan masyarakat. Kolaborasi dengan pemerintah daerah memungkinkan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sementara pemberdayaan guru melalui pelatihan dan penyediaan sumber daya mendukung implementasi yang optimal. Selain itu, koordinasi lintas kementerian, seperti dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, memastikan bahwa nilai budaya lokal dan keselarasan antarjenjang pendidikan tetap terjaga.

Dengan komunikasi yang inklusif dan responsif, Kurikulum yang akan dikembangkan diharapkan dapat membawa transformasi yang bermakna dalam dunia pendidikan Indonesia.

4. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah kami dapat dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa persepsi publik, khususnya dari kalangan mahasiswa dan tenaga pendidik, terhadap pergantian Menteri Pendidikan yang baru mencerminkan harapan besar akan perubahan yang positif dalam sistem pendidikan di Indonesia. Meskipun terdapat pandangan yang beragam, mayoritas responden sepakat bahwa peran pelajar dan tenaga pendidik sangatlah penting dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. Harapan mereka tidak hanya terfokus pada perubahan kurikulum, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, pengurangan beban administrasi guru, dan pelaksanaan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan di lapangan. Dukungan terhadap menteri pendidikan yang baru ini disertai dengan keinginan agar komunikasi yang inklusif, seperti diskusi publik dan kunjungan langsung ke sekolah, dapat dijalankan secara konsisten untuk menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Pemisahan Kementerian Pendidikan menjadi tiga kementerian dinilai sebagai langkah strategis untuk memperbaiki sistem birokrasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan dapat lebih optimal dalam mengembangkan kurikulum yang relevan, memberdayakan guru, meningkatkan infrastruktur, serta menjalin koordinasi yang kuat dengan kementerian lainnya. Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan yang sistematis, terencana, dan didukung oleh sinergi lintas sektor diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang dikembangkan harus berorientasi pada nilai moral, karakter siswa, pemanfaatan teknologi, serta relevansi terhadap tantangan global. Dengan keterlibatan aktif semua stakeholder dan komunikasi yang inklusif, transformasi pendidikan menuju sistem yang lebih mindful, meaningful, dan joyful dapat terwujud secara nyata. Dengan demikian, diharapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, efektif, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. F. (2024). *Pembagian Kemendikbudristek: Peluang Emas atau Dilema Baru bagi Pendidikan Indonesia?* Kompasiana.
- Amelia, C. (2019). Problematika pendidikan di Indonesia. *Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon* |2, 3, 775–779.
- Fadhli, M. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Pendahuluan Mutu. *Tadbir*, 1(02).
- Gunas, T. (2024). *Wacana Ganti Kurikulum oleh Menteri Pendidikan Baru*. Kompasiana.
- Haiyudi. (2024). *Ganti Menteri Ganti Kurikulum, Siapa Takut?* Detiknews.
- Muhadi, I., Giyoto, G., & Untari, L. (2021). Tata Kelola Stakeholder dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 256. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2209>
- Nasution, E. (2008). Problematika Pendidikan di Indonesia Oleh : *Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon*, 1–10.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2), 1–134.
- Rosyda. (2021). *Pengertian Stakeholder: Jenis-jenis, Peran dan Fungsinya*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/stakeholder/?srsltid=AfmBOoqSanEaXoIlJH4eMscmq-D8hXlUhxh6kjE-oiyy7VdFb2ch5Mcr>
- Sundari, & Pharama, T. E. (2021). Stakeholders Dalam Pendidikan. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 5(2), 285–296.